

Pemprov Kaltim Genjot Program Internet Gratis



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Samarinda – Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim memastikan program internet gratis akan terus digencarkan hingga seluruh masyarakat desa di Benua Etam dapat menikmati akses jaringan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari program unggulan pemerintah daerah, yakni *Wi-Fi* Gratis atau *Gratispol*.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengungkapkan, sementara ini sudah ada 441 desa yang memiliki jaringan internet. Sedangkan untuk 400 desa lainnya masih dalam proses pemasangan.

“Total desa di Kaltim ini kan ada sebanyak 841 desa, dan kita menargetkan memang seluruhnya bisa terhubung internet, sehingga tidak ada lagi desa yang terisolasi digital,” ujar Faisal.

Faisal menjelaskan, pada tahap awal pemerataan internet akan dilakukakn di satu titik setiap desa. Titik itu difokuskan pada kantor desa sebagai pusat pelayanan publik, selain itu pemerintah juga akan menanggung biaya operasional internet selama lima tahun.

“Supaya layanan bisa berjalan maksimal tanpa membebani dana desa,”ucapnya.

Selain untuk kantor desa, jaringan internet dengan kapasitas hingga 100 *Mbps* menurut faisal, juga bisa dimanfaatkan di fasillitas umum lain seperti puskesmas, sekolah, maupun balai desa yang berada di satu kawasan. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut merasakan manfaat konektivitas digital secara langsung.

“Makanya untuk melaksanakan program ini, Pemprov menggandeng empat *provider*, yaitu Telkom, Telkomsel, Iconplus, dan Comtelindo,” katanya. Faisal tidak menampik adanya kendala dalam pemasangan jaringan, salah satunya ketersediaan listrik. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemprov Kaltim menyiapkan solusi dengan pemasangan panel surya di desa yang belum terjangkau listrik.

“Langkah ini diharapkan mampu mendukung keberlangsungan layanan internet,” sebutnya. Sementara, dari sisi pendanaan, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar melalui APBD murni, ditambah Rp1,5 miliar dari APBD Perubahan. Anggaran tersebut diproyeksikan mampu menutup kebutuhan pemasangan jaringan internet di seluruh desa.

“Anggaran ini sudah mencakup semua kebutuhan instalasi dan operasional awal. Saat ini masih *on progress*, dan kami optimistis bisa tuntas sesuai target,” terang Faisal.

Pemerataan internet tidak hanya mendukung pelayanan publik, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi desa. Dengan internet, masyarakat dapat mengakses informasi, pendidikan, hingga peluang usaha berbasis digital. **(su/han/mm)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Pemprov Kaltim Genjot Program Internet Gratis, 03/10/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
2. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021) diatur bahwa Menteri menetapkan

kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.

3. Dalam Pasal 14 PP 46/2021 diatur bahwa Menteri menetapkan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.